



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH GUNAWARMAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
3. NHK : **445529**

II. DATA HARTA

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 1.050.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/120 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000 | | |
| 2. Tanah Seluas 650 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000 | | |
| 3. Tanah Seluas 216 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000 | | |
| 4. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/71 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 157.000.000 |
| 1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000 | | |
| 2. MOTOR, SUZUKI FU 150 SCD2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA E1FO2N11M2AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 36.975.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 75.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 1.318.975.000 |



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.318.975.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.